

PENGARUH SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI PELAPORAN (SMEP) TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM TP PKK DI KABUPATEN OKU

Arief Budiman¹; Yunita Sari^{2*}; Rini Efrianti³

Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Baturaja^{1,2,3}

Email : arifb8300@gmail.com¹; yunitaubr1@yahoo.com²; Riniallianz@gmail.com³

ABSTRAK

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu sebuah organisasi yang melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera. Supervisi, monitoring, evaluasi pelaporan (SMEP) pada program pokok PKK merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keteraturan administrasi PKK di tingkat desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Supervisi, dan evaluasi dan pelaporan (SMEP) secara simultan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan program-program TP PKK Kabupaten OKU. Sedangkan monitoring tidak berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan program-program TP PKK Kabupaten OKU dan Supervisi (X1), Monitoring (X2), dan Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) berpengaruh secara parsial sedangkan sisanya dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini, yaitu sebesar 17%.

Kata Kunci : Supervisi; Monitoring; Evaluasi Pelaporan (SMEP); Program TP PKK

ABSTRACT

Family Welfare Empowerment (PKK) is an organization that involves the participation of women and men in efforts to realize prosperous families. Supervision, Monitoring, and Evaluation of Reporting (SMEP) in the PKK's core programs is one effort aimed at ensuring the smooth and orderly administration of the PKK at the village level. The research results indicate that supervision, evaluation, and reporting (SMEP) simultaneously influence the effectiveness of the implementation of PKK programs in OKU Regency. Monitoring, however, has no effect on the effectiveness of PKK programs in OKU Regency. Supervision (X1), Monitoring (X2), and Evaluation and Reporting (SMEP) have a partial effect, while the remaining 17% is influenced or explained by other variables not included in this research model.

Keywords : Supervision; Monitoring; Evaluation; And Reporting (SMEP); PKK Program

PENDAHULUAN

Konsep Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu sebuah organisasi yang melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam upaya mewujudkan keluarga Sejahtera (Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK (Lilik Aslichati, 2011). Kabupaten OKU adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan perkembangan cepat. Sama seperti daerah lain yang mengalami pertumbuhan cepat yang mengupayakan pemberdayaan bagi masyarakat, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberdayakan masyarakat melalui program sosialisasi Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pemerintahan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan mengarah pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi

masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat (Ahmad Ubaidillah, 2021). Pemerintah mempunyai peranan sentral baik secara perencana, penggerak, pengendali, dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemberdayaan adalah konsep yang paling sering kita gunakan dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini (Risna Mardiah, Hasbullah Malau, 2022). Hal ini lebih banyak dititikberatkan di kecamatan yang bekerjasama dengan Tim penggerak (TP) PKK di setiap Kecamatan Tim penggerak Kecamatan sebagai mitra kerja pemerintah Kecamatan berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terwujudnya tujuan gerakan PKK, yakni memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. PKK diharapkan mampu membebaskan perempuan dari belenggu budaya patriarkhi, sehingga memiliki kemandirian (Nurhayati, 2020). Gerakan PKK di Kabupaten OKU adalah suatu wadah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan dapat menggerakkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam pembangunan melalui unit terkecil yaitu keluarga, dimana gerakan tersebut tumbuh dari bawah dengan menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan perempuan sebagai motor penggeraknya (Risna., M dan Hasbullah., M, 2022).

Supervisi, monitoring, evaluasi pelaporan (SMEP) pada program pokok PKK pada program pokok PKK merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keteraturan administrasi PKK di tingkat desa. Supervisi ini dipimpin oleh Ketua tim supervise TP-PKK Kabupaten OKU. Biasanya, kegiatan dimulai dengan sambutan dari Kepala Desa yang mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan supervisi dari TP-PKK Kabupaten OKU, supervisi ini dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan administrasi PKK di desa-desa yang ada di Kabupaten OKU. Pentingnya administrasi yang baik dan tertib dalam menjalankan program-program PKK juga arahan dan masukan kepada pengurus PKK Desa agar dapat meningkatkan kualitas administrasi dan program kerja. Dukungan dan apresiasi kepada pengurus PKK Desa atas usaha dan kerja keras dengan harapan bahwa dengan adanya supervisi PKK Desa-desa yang ada di Kabupaten OKU dapat lebih maju dan berkembang.

Tuntutan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan terus terjadi dari waktu ke waktu seiring dengan cita-cita menuju Indonesia Digital tahun 2045. Perkembangan yang mengubah transmisi dan penerimaan informasi disebabkan oleh adanya jaringan Internet yang memungkinkan individu atau kelompok untuk bertukar informasi meskipun tidak berada di lokasi yang sama, sehingga lebih cepat dan mudah untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi pendorong utama perubahan dalam dunia pemerintahan. Merujuk pada visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara dengan transformasi digital yang komprehensif.

Visi ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana teknologi digital menjadi tulang punggung kemajuan di berbagai sektor (Selvia. L dan Septa., J, 2025).

PKK berfokus pada peningkatan tugas wanita saat pembangunan desa dengan berbagai program yang telah dirancang. Dengan demikian, perempuan diposisikan sebagai agen perubahan yang berkontribusi besar terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas. PKK sendiri memiliki sepuluh program utama, yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila, kebersamaan, kemandirian pangan, kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, koperasi, lingkungan, dan perencanaan keluarga (Lestari dan Juliana, 2025). Pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol atas keputusan dan tindakan yang memengaruhi kesehatan masyarakat, bertujuan untuk memobilisasi individu dan kelompok rentan dengan memperkuat keterampilan dasar hidup dan meningkatkan pengaruh pada hal-hal yang mendasari kondisi sosial dan ekonomi (Endang., et al, 2012).

Fenomena-fenomena efektivitas organisasi yang terjadi, diantaranya; banyaknya sumber daya manusia (SDM) tidak dapat menjamin suatu organisasi dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada. Dalam perekrutan sumber daya manusia dilakukan secara sukarela tanpa melihat keterampilan dan kemampuan yang dimiliki yang disebabkan kurangnya minat yang dimiliki oleh para tokoh wanita untuk menjadi kader PKK Kabupaten OKU. Selain itu, masyarakat hanya berjalannya ketika ada perlombaan pada tingkat Kabupaten. Berdasarkan permasalahan diatas, beberapa anggota Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten OKU memang cenderung kurang memiliki kesadaran akan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya fenomena tentang efektivitas organisasi pada Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten OKU adalah kurangnya daya tarik masyarakat terhadap program yang dimiliki Kelompok PKK Kabupaten OKU dibuktikan dengan minimnya jumlah masyarakat yang bergabung untuk mengikuti program dari PKK Kabupaten OKU tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Supervisi

Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris “*to supervise*” atau mengawasi. Menurut Merriam Webster’s Colligate Dictionary disebutkan bahwa supervisi merupakan “*A critical watching and directing*”. Beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu “*superior*” dan “*vision*”. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai seorang “*expert*” dan “*superior*”, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Supervisi ialah suatu aktifitas pembinaan yang

direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif (Purwanto, 2019).

Manullang (2020) menyatakan bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode - metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran, dan sebagainya.

Manfaat dan Tujuan Supervisi Apabila supervisi dapat dilakukan dengan baik, akan diperoleh banyak manfaat. Manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut, supervisi dapat meningkatkan efektifitas kerja. Peningkatan efektifitas kerja ini erat hubungannya dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bawahan, serta makin terbinanya hubungan dan suasana kerja yang lebih harmonis antara atasan dan bawahan. 2) Supervisi dapat lebih meningkatkan efisiensi kerja. Peningkatan efisiensi kerja ini erat kaitannya dengan makin berkurangnya kesalahan yang dilakukan bawahan, sehingga pemakaian sumber daya (tenaga, harta dan sarana) yang sia-sia akan dapat dicegah. Apabila kedua peningkatan ini dapat diwujudkan, sama artinya dengan telah tercapainya tujuan suatu organisasi. Tujuan pokok dari supervisi ialah menjamin pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan secara benar dan tepat, dalam arti lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan yang telah ditetapkan organisasi dapat dicapai dengan memuaskan (Suarli & Bachtiar, 2021).

Ada beberapa Indikator pelaksanaan supervisi akademik menurut Ofsted sebagaimana yang dikutip oleh Masaong (2012) yaitu meliputi:

1. Melakukan pembimbingan kepada guru dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran seperti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran;
2. Melakukan kegiatan pembimbingan terhadap guru dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran;
3. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang pengawas diharapkan mampu melakukan pembimbingan kepada guru dalam kaitannya dengan penggunaan berbagai media pembelajaran.

Monitoring

Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan (Mercy, 2005). Umumnya, monitoring digunakan dalam checking antara kinerja dan target yang telah ditentukan. Monitoring ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana (*on the track*). Monitoring dapat memberikan informasi keberlangsungan proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan. Pada pelaksanaannya, monitoring dilakukan ketika suatu proses sedang berlangsung. Level kajian sistem monitoring mengacu pada kegiatan per kegiatan dalam suatu bagian (Wrihatnolo, 2018), misalnya kegiatan pemesanan barang pada supplier oleh bagian purchasing. Indikator yang menjadi acuan monitoring adalah output per proses / per kegiatan. Umumnya, pelaku monitoring merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses, baik pelaku proses (*self monitoring*) maupun atasan /supervisor pekerja. Berbagai macam alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan sistem monitoring, baik observasi/interview secara langsung, dokumentasi maupun aplikasi visual (Chong, 2005).

Pada dasarnya, monitoring memiliki dua fungsi dasar yang berhubungan, yaitu *compliance monitoring* dan *performance monitoring* (Mercy, 2005). *Compliance monitoring* berfungsi untuk memastikan proses sesuai dengan harapan /rencana. Sedangkan, *performance monitoring* berfungsi untuk mengetahui perkembangan organisasi dalam pencapaian target yang diharapkan. Umumnya, *output monitoring* berupa *progress report* proses. *Output* tersebut diukur secara deskriptif maupun non-deskriptif. *Output monitoring* bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses telah berjalan. *Output monitoring* berguna pada perbaikan mekanisme proses / kegiatan di mana monitoring dilakukan.

Tujuan sistem monitoring dapat ditinjau dari beberapa segi, misalnya segi obyek dan subyek yang dipantau, serta hasil dari proses monitoring itu sendiri. Adapun beberapa tujuan dari sistem monitoring yaitu (Amsler, *et. al*, 2009) yaitu: 1. Memastikan suatu proses dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga, proses berjalan sesuai jalur yang disediakan (*on the track*). 2. Menyediakan probabilitas tinggi akan keakuratan data bagi pelaku monitoring. 3. Mengidentifikasi hasil yang tidak diinginkan pada suatu proses dengan cepat (tanpa menunggu proses selesai). 4. Menumbuh kembangkan motivasi dan kebiasaan positif pekerja.

Williams (1998), Mengemukakan tujuh bentuk indikator dari sistem monitoring, yaitu:

1. Observasi proses kerja, misalnya dengan melakukan visit pada fasilitas kerja, pemantauan kantor, rantai produksi, maupun karyawan yang sedang bekerja
2. Membaca dokumentasi laporan, berupa ringkasan kinerja dan *progress report*.

3. Melihat display data kinerja lewat layar komputer
4. Melakukan inspeksi sampel kualitas dari suatu proses kerja
5. Melakukan rapat pembahasan perkembangan secara individual maupun grup
6. Melakukan survei klien/konsumen untuk menilai kepuasan akan layanan jasa suatu organisasi
7. Melakukan survei pasar untuk menilai kebutuhan konsumen sebagai pedoman dalam tindak lanjut perbaikan.

Sistem Monitoring Evaluasi Pelaporan (SMEP)

Sistem Monitoring Evaluasi Pelaporan (SMEP) adalah semua cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan tersebut. SMEP berfungsi sebagai pemantauan dan evaluasi berbasis data yang memudahkan pengelolaan dan evaluasi program regional secara keseluruhan. Integrasi peraturan daerah, kebijakan nasional, dan sistem evaluasi ini akan memungkinkan pemerintah Kabupaten OKU meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengoptimalkan pengelolaan anggaran. Amir Syamsuadi & M. Zainuddin. (2018) menyatakan tujuan pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC No.1 (1980) yaitu; 1). Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditur, dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. 2). Pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditur, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. 3). Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber tersebut dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. 4). Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. 5). Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman, dan pembiayaan kembali pinjaman, transaksi modal, termasuk dividen kas dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan. 6). Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik (pemegang saham) atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. 7). Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai dengan kepentingan pemilik. Ketepatan waktu Sistem Monitoring Evaluasi Pelaporan (SMEP) adalah rentang waktu mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) sampai tanggal penyerahan ke Bapepam-LK (Nurmiati, 2016).

Suharto (2014), Indikator Sistem Monitoring Evaluasi Pelaporan (SMEP) Khusus TP PKK yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah program PKK yang terkait dengan SMEP.
2. Jumlah anggota PKK yang terlibat dalam program SMEP.
3. Tingkat kepuasan anggota PKK terhadap program SMEP (%).
4. Jumlah kegiatan yang dilakukan oleh TP PKK untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya SMEP.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Program TP PKK Di Kabupaten OKU

Menurut Steers (2020:209-212), ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Ciri Organisasi: Faktor ini mencakup struktur organisasi, budaya organisasi, dan sumber daya organisasi. Contohnya, apakah organisasi memiliki struktur yang fleksibel atau kaku, apakah budaya organisasi mendukung inovasi atau tidak.
2. Ciri Lingkungan: Faktor ini mencakup kondisi ekonomi, politik, sosial, dan teknologi yang mempengaruhi organisasi. Contohnya, apakah kondisi ekonomi sedang baik atau buruk, apakah perubahan teknologi mempengaruhi industri.
3. Ciri Pekerja: Faktor ini mencakup karakteristik individu pekerja, seperti kemampuan, motivasi, dan kepuasan kerja. Contohnya, apakah pekerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas, apakah mereka termotivasi untuk bekerja.
4. Kebijakan dan Praktek Manajemen: Faktor ini mencakup keputusan dan tindakan manajemen yang mempengaruhi organisasi, seperti kebijakan sumber daya manusia, kebijakan operasional, dan kebijakan strategis. Contohnya, apakah manajemen memiliki kebijakan yang mendukung pengembangan karyawan, apakah mereka memiliki rencana strategis yang jelas (Arini Sulistyowati, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara sengaja (*Purposive*) pada Kader PKK Kecamatan di Kabupaten OKU. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada pemanfaatan data primer dan sekunder. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif untuk mengukur variabel-variabel tertentu dan menentukan hubungan antara faktor supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan (SMEP). Metode penarikan contoh dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, dimana populasinya terdiri dari 65 orang, yaitu seluruh Kader PKK setiap kecamatan di Kabupaten OKU yang bertugas sebagai petugas evaluasi program PKK. Metode pengolahan data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Penggunaan analisis regresi linear berganda ini dikarenakan data yang diperoleh dianggap sebagai data populasi dan berdistribusi normal serta antara variabel independen dan dependen terdapat hubungan linear.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil persamaan regresi berganda (Lihat tabel 1) memberikan pengertian bahwa Supervisi (X1), Monitoring (X2), dan Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) berpengaruh terhadap Efisiensi Pelaksanaan Program TP PKK (Y).

1. Nilai koefisien regresi $X_1 = 0,076$ artinya jika X_1 meningkat sebesar satu satuan maka $Y =$ pelaksanaan program PKK meningkat sebesar 0,076
2. Nilai koefisien regresi X_2 memiliki koefisien regresi bertanda positif (+) sebesar 0,466 artinya jika X_2 meningkat sebesar satu satuan maka $Y =$ pelaksanaan program PKK meningkat sebesar 0,466
3. Nilai koefisien $X_3 = 0,573 >$ artinya jika X_1 meningkat sebesar satu satuan maka $Y =$ pelaksanaan program PKK meningkat sebesar 0,0573

Pengujian pengaruh supervisi terhadap efisiensi pelaksanaan program TP PKK diperoleh nilai t hitung = 2,124 dengan sig 0,001. Karena nilai t hitung (2,124) > t tabel (1,997) dan nilai sig 0,001 < sig α (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_a dalam penelitian ini diterima, yang artinya variabel supervisi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaksanaan program TP PKK. Maka H_1 diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Muharram et., al (2025), menyatakan pada tahap supervisi, pihak yang bertanggung jawab, seperti tim penggerak PKK desa dan kecamatan, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program. (Ayu Nur Fadilah, 2023) juga menyatakan Mereka memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Perpres dan rencana kerja. Di Desa Margamulya, supervisi dilakukan dengan mendatangi lokasi-lokasi kegiatan, seperti tempat pelatihan keterampilan atau posyandu, dan berinteraksi langsung dengan keluarga penerima manfaat untuk mengevaluasi keberhasilan program.

Berdasarkan analisis terkait Monitoring diperoleh nilai t hitung = 0,817 dengan sig 0,410. Karena nilai t hitung (0,817) < t tabel = (1,997) dan sig 0,410 > sig. α (0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_a dalam penelitian ini diterima yang artinya variabel monitoring tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efisiensi pelaksanaan program TP PKK. Maka H_2 ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian Mardiah., R dan Malau., H (2022) menyatakan program belum efektif, karena monitoring program yang dilakukan masih belum memberikan hasil yang baik, program yang dilakukan belum sepenuhnya kontinu dalam pelaksanaannya. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program PKK yaitu terdiri dari hambatan internal yaitu SDM (sumber daya manusia) pada tim PKK yang belumberkualitas. Kedua, sistem sosialisasi yang terbatas. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program PKK

Pengujian pengaruh evaluasi dan pelaporan (SMEP) terhadap pelaksanaan program PKK diperoleh nilai thitung = 3,846 dengan sig 0,004. Karena nilai thitung (3,846) > t tabel (1,997) dan nilai sig 0,004 < sig α (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_a dalam penelitian ini diterima, yang artinya variabel evaluasi dan pelaporan (SMEP) mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaksanaan program TP PKK. Maka H_3 diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian Lestari.,S dan Juliana., S (2025) menyatakan komponen evaluasi dan pelaporan memiliki peran strategis terhadap keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program TP PKK karena alasan menilai efektivitas pelaksanaan program, Evaluasi dan pelaporan memungkinkan pengurus PKK mengetahui sejauh mana program yang dijalankan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Oos M. Anwas (2011), Dengan evaluasi dan laporan, dapat diketahui apakah kegiatan sesuai dengan rencana kerja, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hasil evaluasi dan pelaporan membantu menentukan apakah strategi pelaksanaan sudah efisien atau perlu diperbaiki.

Nilai Adjusted R Square dalam penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,830, menunjukkan bahwa 83,0% dari varians Pelaksanaan Program TP PKK, dapat dijelaskan oleh variabel Supervisi (X_1), Monitoring (X_2), dan Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) sedangkan sisanya dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini, yaitu sebesar 17%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Supervisi, dan evaluasi dan pelaporan (SMEP) secara simultan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan program-program TP PKK Kabupaten OKU. Sedangkan monitoring tidak berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan program-program TP PKK Kabupaten OKU. Supervisi (X_1), Monitoring (X_2), dan Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) berpengaruh secara parsial sedangkan sisanya dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini, yaitu sebesar 17%.

Saran

Secara Praktis, supervisi, evaluasi dan pelaporan (SMEP) perlu ditinjau dan dioptimalkan sebagai dasar untuk perbaikan karena terbukti berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan program TP PKK Kabupaten OKU.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Nur Fadilah, Hikmah Muhaimin, Tri Ratnarinayuhani (2023). Efektifitas Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Terhadap Pembangunan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Kauman Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Jurnal Ilmu Pemerintahan Majapahit Policy, Vol 3 No 2.

- Arini Sulistyowati (2022). The Effectiveness Model Of Pkk Institutional Empowerment In Women And Community Empowerment In Gubeng District, Surabaya City. *Jurnal Administrasi Publik*, 2022 June Vol. 20 No. 1.
- Amir Syamsuadi & M. Zainuddin. (2018). Strategi Pos Pemberdayaan Keluarga Dalam Penguatan Fungsi Kelembagaan Sosial Di Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru. *Jurnal Dinamika Pemerintahan* Vol. 2, No. 2.
- Ahmad Ubaidillah, Miftahal Anjarsabda Wira Buana, Moh. Ah. Subhan ZA (2021). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Lazisnu. *Jurnal BUDIMAS*. Vol. 03, No. 02.
- Chairil Nur Siregar (2014). Membangun Perilaku Masyarakat Atambua Melalui Pemanfaatan Potensi Daerah Dan Keamanan Perbatasan Republik Indonesia Dengan Republik Demokratik Timor Leste. *Jurnal Sosioteknologi* Volume 13, Nomor 2.
- Endang Sutisna Sulaeman, Ravik Karsidi, Bhisma Murti, Drajat Tri Kartono, Waryana, Rifai Hartanto (2012). Community Empowerment Model in Health Sector, Study on Village Preparedness Program. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 7, No. 4
- Febrianaseery Muharram, Irfan Nursetiawan dan Asep Nurwanda. (2025). Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Desa Margamulya Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya. *Kampus Akademik Publisher Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* Vol.3, No.5.
- Risna Mardiah dan Hasbullah Malau (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga) Di Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 6 No. 2.
- Selvia Lestari dan Septa Juliana (2025). Evaluasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Mahasiswa Pemerintah*. Vol 2 No. 2.
- Wahyulen, W., Sari, Y., Oktarina, Y., & Purnomowati, I. (2025). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), 1735-1744.
- Oos M. Anwas (2011). Kuliah Kerja Nyata Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga Sebagai Model Pengabdian Masyarakat Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 17, Nomor 5
- Lilik Aslichati (2011). Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 7, Nomor 1.
- Risna Mardiah1, Hasbullah Malau. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga) Di Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 6 Nomor 2
- Sovia Helena Kindangen (2020). Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Administratum*, Vol. 8 No. 1
- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

TABEL

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized B	Coefficient Std. Error	Standardized Coefficient B	t	Sig.
constant	4.256	.477		-2.884	.254
Supervisi (X1)	.867	.622	.076	2.124	.001
Monitoring (X2)	.086	.357	.466	.817	.410
Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) (X3)	.574	.178	.573	3.846	.004

Dependent Variabel : Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP). Sumber: diolah, 2025